



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa perlu penyelarasan dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hingga Renja Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut penyelarasan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Dengan penyelarasan tersebut, maka Renstra BKD Provinsi Sulawesi Barat harus berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan juga perlu diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Renja BKD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara berupaya terus menerus untuk dapat menjadi lembaga yang Terdepan, Malaqbiq, dan Inovatif di dalam pengelolaan manajemen SDM Aparatur agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terukur, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam penyusunan rencana kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di

bidang kepegawaian, peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur, peningkatan kualitas penataan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kualitas informasi manajemen kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui program dan kegiatan yang terencana dan terintegrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, dimana rencana programnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Kepegawaian Daerah;

Renja BKD Provinsi Sulawesi Barat tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga BKD Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2025.

1.4 Permasalahan

1. Masalah Pengembangan Budaya Kerja

Kendala internal yang dihadapi dalam upaya mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat juga bersumber pada belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya kerja terutama budaya pelayanan sebagai satu sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati dan dijadikan pedoman tingkah laku. Akibatnya berbagai masalah yang berhubungan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal belum sepenuhnya mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.

2. Masalah Peningkatan Koordinasi Internal

Keterpaduan perencanaan dalam RENSTRA, baik keterpaduan program maupun sasaran, memerlukan kemantapan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, sinkronisasi dan evaluasi pada tataran operasionalnya, khususnya koordinasi antar bidang dan internal bidang. Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan manajemen

aparatur, diperlukan pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berkelanjutan.

3. Masalah peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai Januari 2014 ini serta peraturan-peraturan lain yang mengikutinya. Kompetensi aparatur yang perlu mendapat perhatian adalah terutama dalam aspek E3. Pertama; pemberdayaan (empower) yaitu memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat. Kedua; pembelajaran (educate) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Ketiga; pencerahan (enlighten) yaitu membuka wawasan aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk berpikir maju, dinamis dan kreatif yang mengarah pada perubahan peningkatan kinerja organisasi.

4 Masalah Optimalisasi Hasil Program dan Kegiatan

Dampak dari belum optimalnya konsistensi sasaran program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah serta belum optimalnya komitmen untuk berbuat yang terbaik dari seluruh jajaran organisasi, dikhawatirkan akan dapat menghambat tercapainya sasaran hasil atau manfaat (outcome) yang diharapkan dari setiap kegiatan operasional dan cenderung menghasilkan output semata.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat : Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi



Sulawesi Barat Tahun 2025 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Tahun 2023-2026

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat : Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan Tahun 2025 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Tahun 2023-2026

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 dan Capaian Output Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Pagu : Rp. 9.928.556.781
Realisasi : Rp. 9.706.391.707 (97.76%)
Realisasi Fisik (%) : 100%

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Anggaran Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Rp	Rp	Rp		
Jumlah Total	9.928.556.781	9.706.391.707	97,76%		
Jumlah Non Urusan	6.408.314.159	6.363.403.821	99,30%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.408.314.159	6.363.403.821	99,30%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.006.000	150.006.000	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.387.000	113.387.000	100%	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.619.000	24.619.000	100%	Tidak ada	Tidak ada
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100%	Tidak ada	Tidak ada
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.230.636.859	5.206.305.487	99,53%	Dilakukan refokusing anggaran	Merencanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.227.417.459	5.203.137.287	99,54%	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.366.800	1.347.200	98,57%	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.852.600	1.821.000	98,29%	Tidak ada	Tidak ada



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Rp	Rp	Rp		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.005.202	435.211.299	97,36%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.666.000	4.568.000	97,90%	Tidak ada	Tidak ada
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.400.000	35.540.000	97,64%	Tidak ada	Tidak ada
Penyediaan Bahan/Material	42.080.250	41.258.000	98,05%	Tidak ada	Tidak ada
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.582.352	341.003.699	97,27%	Tidak ada	Tidak ada
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.276.600	12.841.600	96,72%	Tidak ada	Tidak ada
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.900.900	118.956.480	99,21%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.900.900	118.956.480	99,21%	Tidak ada	Tidak ada
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.001.000	367.288.155	97,94%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.750.000	9.556.655	98,02%	Tidak ada	Tidak ada
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.251.000	357.731.500	97,94%	Tidak ada	Tidak ada
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.764.198	85.636.400	99,85%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.764.198	85.636.400	99,85%	Tidak ada	Tidak ada



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Rp	Rp	Rp		
Jumlah Urusan	3.520.242.622	3.342.987.886	94,96%		
Program Kepegawaian Daerah	3.520.242.622	3.342.987.886	94,96%		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.239.900.921	1.203.735.063	97,08%		
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	475.178.731	449.064.063	94,50%	1. Jumlah formasi yang diberikan masih belum mencukupi kebutuhan 2. Kuota formasi Calon Praja IPDN pada masing-masing wilayah sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat	1. Melakukan koordinasi intensif dengan BKN terkait seleksi penerimaan CPNS berikutnya 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemenuhan kebutuhan formasi Calon Praja IPDN
Pengelolaan Data Kepegawaian	145.657.150	139.620.600	95,86%	Tidak ada	Memaksimalkan tingkat capaian anggaran
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	36.380.500	33.777.700	92,85%	Tidak ada	Memaksimalkan tingkat capaian anggaran
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	500.000.000	500.000.000	100,00%	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	82.684.540	81.272.700	98,29%	Berkas usulan pensiun yang telah diajukan belum semua SK nya telah terbit, masih ada beberapa berkas PNS yang masih diverifikasi BKN	Melakukan koordinasi dengan BKN
Mutasi dan Promosi ASN	641.615.812	535.975.007	83,54%		
Pengelolaan Mutasi ASN	399.056.483	306.350.074	76,77%	Banyaknya permohonan pindah masuk dan keluar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga perlu dilakukan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait penyusunan Analisis Kebutuhan dan Analisis Beban Kerja.
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	71.321.679	65.682.900	92,09%	Kurangnya perhatian PNS untuk melakukan perbaikan berkas dalam rangka percepatan proses administrasi kenaikan pangkat	Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang membidangi Kepegawaian di Perangkat Daerah yang bersangkutan
Pengelolaan Promosi ASN	171.237.650	163.942.033	95,74%	Tidak ada	Tidak ada



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Rp	Rp	Rp		
Pengembangan Kompetensi ASN	1.311.073.831	1.284.142.992	97,95%		
Pengelolaan Assessment Center	177.512.280	176.514.687	99,44%	Tidak ada	Tidak ada
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	87.405.500	86.204.000	98,63%	Tidak ada	Tidak ada
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	980.394.256	957.323.984	97,65%	Tidak ada	Tidak ada
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	65.761.795	64.100.321	97,47%	Tidak ada	Tidak ada
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	327.652.058	319.134.824	97,40%		
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	19.482.124	19.394.124	99,55%	PNS yang akan mendapatkan penghargaan adalah mutlak kewenangan BKN Pusat setelah melalui tahap verifikasi.	Melakukan koordinasi dengan BKN
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	104.898.950	101.206.950	96,48%	Pelaporan kinerja pegawai dari perangkat daerah masih belum tepat waktu sehingga pelaporan sasaran kinerja keseluruhan pegawai Pemprov juga terlambat	Melakukan konsultasi dengan Pimpinan
Pembinaan Disiplin ASN	203.270.984	198.533.750	97,67%	Tidak ada	Tidak ada

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
			K	K	K
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup BKD	point	76	79	103%
	Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD	persen	80	86,80	109%
	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD	persen	98	98	100%
	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BKD	persen	75	80,70	108%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD	point	25	26,00	106%
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD	point	21	21,00	102%
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD	point	12	9,50	77%
	Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD	point	8	22,00	268%
	Nilai Capaian Kinerja Lingkup BKD	point	16	-	0%
	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup BKD	persen	100	100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	7	7	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	7	7	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	12	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	persen	95	98	103%
	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD	persen	95	98	103%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	50	50	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1,00	100%



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
			K	K	K
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD	persen	100	100,00	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	2	2	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	32	32	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	10	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	31	31	100%
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata Kelola Manajemen ASN	persen	70	31	44,29%
	Nilai dimensi kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN	point	17	22	126,59%
	Nilai dimensi kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN	point	17	24	140%
	Nilai dimensi disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	point	5	5	100%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai	persen	2,70	2,24	82,96%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	155	371	239,35%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	12	12	100%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	12	12	100%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga	1	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	100	145	145%



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
			K	K	K
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi	persen	90	89	99,11%
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	dokumen	320	202	63,13%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	laporan	600	1.393	232,17%
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen	40,00	29,00	72,50%
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	persen	15,45	18,50	120%
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	1	1	100%
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	dokumen	100	172	172%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	dokumen	20	96	480%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	orang	200	454	227%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin	persen	7%	4,76%	68%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	300	1.034	345%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	12	12	100%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang	20	20	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk analisis kinerja pelayanan pada BKD Provinsi Sulawesi Barat akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja pelayanan yang ada dan pada tahun 2023 kinerja BKD Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi. Evaluasi program prioritas tahun anggaran 2023 BKD Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 2 program yang di analisis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.408.314.159 proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 6.363.403.821 (99,30%). Indikator Programnya adalah:
 1. Nilai SAKIP lingkup BKD. Persentase capaian kinerja sebesar 103%;
 2. Nilai rapor SPBE lingkup BKD. Persentase capaian kinerja sebesar 109%;
 3. Tingkat capaian kinerja anggaran lingkup BKD. Persentase capaian kinerja sebesar 100%;
 4. Tingkat tata kelola manajemen ASN lingkup BKD. Persentase capaian kinerja sebesar 108%.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.520.242.622 proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.342.987.866 (94,96%). Indikator Programnya adalah:
 1. Persentase tata kelola manajemen ASN. Persentase capaian kinerja sebesar 44,29%;
 2. Nilai dimensi kualifikasi pada indeks profesionalitas ASN. Persentase capaian kinerja sebesar 125,59%;
 3. Nilai dimensi kinerja pada indeks profesionalitas ASN. Persentase capaian kinerja sebesar 140%;
 4. Nilai dimensi disiplin pada indeks profesionalitas ASN. Persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2.3 Isu-isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan permasalahan yang ada pada setiap bidang bermuara pada Isu Strategis yang sekarang, diantaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perlunya segera penerapan E-Government kepada seluruh Instansi Pemerintah
2. Penyusunan formasi pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan

3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang belum maksimal
4. Akuntabilitas dalam pelayanan kepegawaian
5. Moratorium Pengadaan CPNS kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan
6. Belum terukurnya kinerja PNS

Dalam upaya penyelesaian masalah masalah yang dan isu strategis yang ada, diperlukan langkah langkah strategis yang akan disusun berdasarkan analisa, dengan menggunakan metode analisis SWOT dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan pendekatan USG (Urgency, Seriousness, Growth) maka diperoleh beberapa hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. KEKUATAN

- Adanya aturan kepegawaian;
- Adanya komitmen pimpinan dalam penataan manajemen kepegawaian;
- Suasana kerja di BKD yang kondusif; dan
- Adanya pembagian tugas yang jelas yang dituangkan dalam tupoksi

2. KELEMAHAN

- Belum adanya Standart Pelayanan Minimum (SPM)
- Terbatasnya dana, sarana dan prasarana
- Masih kurangnya kesesuaian kompetensi PNS dengan jabatan
- Distribusi PNS yang belum merata

3. PELUANG

- Adanya peraturan kepegawaian yang mendukung profesionalisme pegawai
- Adanya Motivasi pengembangan kompetensi SDM secara mandiri
- Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian
- Banyaknya lembaga baik Nasional maupun Internasional dalam pengembangan SDM yang memadai
- Komitmen OPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur

4. ANCAMAN/TANTANGAN

- Adanya beberapa Peraturan kepegawaian yang sering berubah dan kontraproduktif
- Sistem Politik yang cenderung mengganggu Netralitas PNS
- Keterbatasan otoritas pengelolaan kepegawaian
- Kompleksitas permasalahan pegawai
- Rekrutmen pegawai yang tidak berkesinambungan
- Sebagian Pengelola kepegawaian OPD belum optimal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi
- Komitmen dan pemahaman PPK di enam kabupaten Sulawesi Barat yang belum sama

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang tersebar pada delapan wilayah kerja.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur negara sangat diperlukan bukan saja untuk menghadapi berbagai perubahan strategik ditingkat nasional dan internasional, tetapi terlebih lagi untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Pada dasarnya langkah kebijakan tersebut berintikan pada pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Program Reformasi Birokrasi, yang di dalamnya mengamanatkan capaian kinerja mengenai: Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas, Perbaikan bidang pengawasan, Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi.

Komitmen BKN untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam visi BKN dalam renstra 2020-2024, yaitu: “mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter ASN yang dituangkan kedalam Visi Badan Kepegawaian Negara 2020-2024, yaitu:

1) Profesional

- a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien; sebagai upaya untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

- b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2) Bermartabat

- a) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.
- b) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (21) bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditanamkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

Beberapa unsur yang sama dari visi dan rencana strategi baik Badan Kepegawaian Negara maupun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah menyangkut manajemen kepegawaian guna mewujudkan Profesionalisme pegawai yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Yang Terdepan, Malaqbiq Dan Inovatif”

3.1.2. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Visi dari Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wadah NKRI”.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang kepegawaian (desentralisasi di bidang kepegawaian), sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudian daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem kepegawaian sendiri dalam rangka pemenuhan akan tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi BKD Provinsi Sulawesi Barat, maka yang menjadi langkah strategi adalah pengaturan regulasi yang mendukung pengembangan PNS, sehingga terdapat keselarasan ketika pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya, kemudian daerah menindak lanjuti dengan regulasi yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat.

3.1.3 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, terdapat 4 tujuan, 16 sasaran, 16 strategi, 58 arah kebijakan, 23 Indikator Kinerja Utama. Badan Kepegawaian Daerah mendukung tujuan sebagai berikut:

“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”

Visi Badan Kepegawaian Daerah dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan pelayanan dibidang kepegawaian menggunakan konsep efektif dan efisien, konsep efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Efisiensi adalah suatu asas dasar tentang perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. Efisiensi merupakan pelaksanaan cara-cara tertentu dengan cara dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya dan terpendek jaraknya. Konsep efektivitas dan efisien ini diterjemahkan kedalam program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan, adapun konsep yang digunakan adalah perkantoran yang ramah lingkungan dengan berupaya mengurangi penggunaan kertas (Less Paper) dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Kantor merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha dimana dapat ketergantungan system antara orang, teknologi, dan prosesur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, pengumpulan, mengelola, menyimpan sampai menyalurkan. Kantor tersebut melaksanakan perkantoran. Kegiatan perkantoran perlu direncanakan, diorganisasikan dan digerkan oleh semua sumber daya yang terlibat atau dilibatkan, serta perlu diawasi dan dikendalikan sebaik-baiknya istilah modern artinya

terbaru, mutakhir, terkini, sikap dan cara berfikir serata bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian maka manajemen kantor moderen adalah penyelenggara semua kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan kantor yang modern. Semakin modernnya suatu kantor, maka semakin banyak data, informasi, dan kegiatan yang dapat diakses dengan lebih efektif, efisien dan profesional. Sehingga organisasi akan mampu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan perubahan dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif.

Adapun misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah adalah Misi ke 2 yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya dan Misi ke 5 yaitu: Mengarusutamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat dievaluasi secara berkala melalui analisis jabatan terhadap tingkat profesionalisme aparat sesuai deskripsi jabatan, dengan senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan penatalaksanaannya baik sistem, prosedur maupun tata kerja pengembangan sarana dan prasarana kerja guna meningkatkan gairah dan semangat kerja aparat, serta senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sehingga mampu menerjemahkan dan mewujudkan kebijakan pembangunan daerah secara akurat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam mencapai visi organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai misi sebagai berikut :

Mengelola sumber daya aparatur dengan 3T (Tepat waktu, Tepat kebutuhan, Tepat aturan)

1. Mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian kedalam e-Government
2. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
3. Meningkatkan produktifitas dan kinerja aparatur berbasis kompetensi.
4. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas Aparatur Sipil Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah maka dirumuskan kebijakan strategi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

selama 5 (lima) tahun kedepan.

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dan Kualitas Asn Untuk Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan sistem manajemen SDM aparatur.

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BKD;
2. Meningkatnya sistem manajemen SDM aparatur.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline	Perkiraan	Target Kinerja			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dan Kualitas Asn Untuk Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BKD	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BKD	Persen	72,45	72,75	73	73,3	73,7	74
2	Meningkatkan sistem manajemen SDM aparatur	Meningkatnya sistem manajemen SDM aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Poin	41,46	46	49	52	57	62

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program- program tersebut diantaranya:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
- d) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

- g) Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - b) Penyediaan bahan logistik kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan/material
 - e) Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan mebel
 - d) Pengadaan aset tak berwujud
 - e) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - c) Fasilitasi lembaga profesi ASN

- d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e) Pengelolaan data kepegawaian
- 2) Mutasi dan Promosi ASN
 - a) Pengelolaan mutasi ASN
 - b) Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c) Pengelolaan promosi ASN
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN
 - a) Pengelolaan assessment center
 - b) Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
 - c) Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - d) Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
 - e) Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN
 - f) Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN
 - g) Penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
 - h) Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
 - i) Evaluasi diklat dan sertifikasi Pejabat fungsional
 - j) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
 - k) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - l) Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
 - m) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - c) Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - d) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - e) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
 - f) Pembinaan disiplin ASN
 - g) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - h) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
 - i) Evaluasi disiplin ASN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka program dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih profesional, netral dan sejahtera.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Setiap sasaran strategik dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang merupakan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan tahun 2025 terlampir pada halaman berikut:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						16.732.767.855,00								17.709.664.105,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						16.732.767.855,00							17.709.664.105,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN						16.732.767.855,00							17.709.664.105,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD Nilai SAKIP Lingkup BKD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BKD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD	-			4,45 Poin 79,1 Poin 90 Persen 95 Persen	7.533.231.945,00						-	7.409.664.105,00		
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD	-			22 Poin 9,7 Poin 21,2 Poin 26,2 Poin	60.240.874,00						-	60.240.874,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	27.004.467,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.004.467,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	26.559.307,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.559.307,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.677.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.677.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	-			95 Persen 95 Persen	6.546.192.292,00						-	6.546.192.292,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				53 Orang/Bulan	6.526.624.038,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		6.526.624.038,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	19.568.254,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.568.254,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD</i>	-			100 Persen	244.182.879,00			-	-	-	-	120.615.539,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	9.652.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.652.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	88.797.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.797.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	7.598.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.598.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	14.567.679,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.567.679,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	123.567.340,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	125.400.000,00			-	-	-	-	125.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	36.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	68.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	483.457.500,00			-	-	-	-	483.457.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.872.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.872.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	478.585.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		478.585.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	73.758.400,00			-	-	-	-	73.758.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				31 Unit	63.758.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.758.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN Persentase Tata Kelola Manajemen ASN	-			20 Poin 5 Poin 80 Persen	9.199.535.910,00						-	10.300.000.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai</i>	-			2.96 Persen	1.370.690.441,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	1.840.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				150 Dokumen	112.825.562,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				103 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				12 Dokumen	137.864.879,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Persentase jabatan yang terisi</i>	-			90 Persen	500.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	745.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah</i>				400 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				620 Laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				44 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN</i>	-			15.45 Persen	7.130.469.213,00			-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	7.365.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>				101 Dokumen	40.407.531,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>				100 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>				26 Dokumen	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		7.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>				300 Orang	40.061.682,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin</i>	-			17 Persen	198.376.256,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				190 Orang	28.376.256,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				12 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
J U M L A H								16.732.767.855,00							17.709.664.105,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf BKD Provinsi Sulawesi Barat merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target- target kinerja dalam Renstra 2023–2026.

Renja BKD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 ini akan menjadi pedoman kerja dari seluruh bidang yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BKD Provinsi Sulawesi Barat. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKD Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2025, Renja BKD Provinsi Sulawesi Barat ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia BKD Provinsi Sulawesi Barat, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang terdepan, malaqbiq dan inovatif di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 12 Juli 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



Ditandatangani secara elektronik



BUJAERAMY HASSAN, SH.,M.Si